



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI
DENGAN MAYJEN TNI DONI MONARDO, Dr. JOSEP WILLIAM (YAYASAN
MEDICUSS), MERAH JOHANSYAH (KOORDINATOR JATAM),
DAN SENIOR ADVISOR BALI FOKUS**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2017-2018 |
| Masa Persidangan | : I |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Dengan | : Mayjen TNI Doni Monardo, Dr. Josep William (Yayasan Medicuss), Merah Johansyah (Koordinator Jatam), dan Senior Advisor Bali Fokus |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Kamis, 7 September 2017 |
| Waktu | : Pukul 11.00 WIB s.d 14.20 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lt 1 |
| Ketua Rapat | : H. Hadi Mulyadi, S.Si. M.Si. (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI) |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Nanik Herry Murti |
| Hadir Anggota | : Orang dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin |
| Hadir Pemerintah | : Mayjen TNI Doni Monardo, Dr. Josep William (Yayasan Medicuss), Merah Johansyah (Koordinator Jatam), dan Senior Advisor Bali Fokus |
| Acara | : Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Pengesahan <i>Minamata Convention on Mercury</i> (Konvensi Minamata mengenai Merkuri). |

CATATAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 7 September 2017 dibuka pukul 11.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI H. Hadi Mulyadi, S.Si. M.Si., dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri).

II. CATATAN RAPAT

Narasumber memberikan beberapa masukan, penjelasan terkait pembahasan RUU tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) diantaranya;

1. **Mayjen TNI Doni Monardo (Pangdam XVI Pattimura)**

- Terjadi kerusakan lingkungan di Gunung Botak akibat kegiatan penambangan dengan menggunakan merkuri dan sianida
- Merkuri masih bebas di jual dengan harga yang relatif murah. Untuk itu perlu perhatian yang lebih serius dari Pemerintah terutama dalam mengatur distribusi, dan penjualan merkuri

2. **Dr. Josep William (Yayasan Medicuss)**

- Penyebara merkuri telah ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia
- Di Indonesia diperkirakan terdapat 800 lokasi pertambangan rakyat yang belum terkelola dengan baik oleh negara, dimana total produksi emas dari kegiatan pertambangan tersebut mencapai sekitar 192-384 ton emas pertahun. Mengingat potensi yang cukup besar dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya maka kegiatan pertambangan tersebut perlu diatur dan dikendalikan kegiatannya oleh Pemerintah

3. **Merah Johansyah (Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM))**

- Salah satu penyumbang emisi merkuri adalah sektor pertambangan, baik skala besar maupun skala kecil. Dan hampir semua jenis pertambangan mineral dan batubara juga menyumbang emisi merkuri
- DPR RI bersama Pemerintah perlu mengumumkan Darurat Mercury di Indonesia dan mendukung agar konvensi Minamata dapat diratifikasi
- Perlu adanya moratorium perluasan maupun penerbitan izin baru tambang, terutama tambang cinnabar, tidak boleh diterbitkan izin baru dan perlu dicabut izin-izin yang sudah ada
- Mendorong mata pencaharian alternative dengan memetakan potensi daerah penambang agar tidak menambang dan masyarakat di dorong lewat ekonomi tanding dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

4. Balifokus

- Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang menggunakan merkuri sudah banyak menimbulkan dampak kesehatan, kerusakan lingkungan dan sosial ekonomi. Selain itu mengancam ketahanan nasional karena sumber daya manusia di daerah-daerah PESK lemah, IQ rendah dan mudah terkena penyakit. Untuk itu penanganan perdagangan dan pasokan merkuri ilegal di perlukan kerjasama internasional selain kerjasama multisektor di tingkat nasional
- Indonesia segera meratifikasi Konvensi Minamata tentang merkuri
- Penghapusan penggunaan merkuri di sektor kesehatan (terutama dental amalgam) dan mengendalikan emisi merkuri dari sektor-sektor yang berkontribusi besar yaitu; PLTU, TPA open dumping, industri pulp dan kertas, pertambangan dan sektor migas. Untuk itu Pemerintah perlu mempromosikan serta mendorong produk-produk alternatif yang tidak menggunakan merkuri (termasuk fungsida, cat, baterai, rontgen dan produk-produk alat kesehatan)

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.20 WIB

Jakarta, 5 September 2017
KETUA RAPAT,


H. HADI MULYADI, S.Si. M.Si.